

**KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM PENGELOLAAN  
PERBATASAN DI KALIMANTAN**



# **KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN DI KALIMANTAN**

**Editor:  
Drs. Humphrey Wangke, M.Si.**

**Kata Pengantar:  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2017

**Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)**

Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan /  
Drs. Humphrey Wangke, M.Si. (ed.); kata pengantar: Ganewati Wuryandari—  
Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

xxii + 146 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-602-433-580-9

Judul:  
Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan  
Drs. Humphrey Wangke, M.Si. (ed.)

*Copyrights* © 2017  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
All rights reserved

Penerbitan ini atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2017  
YOI: 1470.36.24.2018  
Desain sampul: Rahmatika

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230  
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114  
Faksimile: +62 (0)21-31924488  
Email: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
Website: [www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

# KATA PENGANTAR

## MENCARI FORMAT TATA KELOLA PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

*Ganewati Wuryandari*

### I

Tata kelola perbatasan (*border governance*) merupakan sebuah keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan secara maritim dan atau darat dengan negara lain. Indonesia yang terletak secara geografis di antara dua benua dan dua samudera dan tidak kurang dari 17.504 pulau<sup>1</sup> yang tersebar di seluruh nusantara memiliki batas laut dengan sepuluh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan

---

1 Jumlah pulau di Indonesia selama ini memiliki jumlah yang berbeda dari berbagai sumber data yang berbeda pula. Ini karena informasi jumlah pulau yang ada belum dibakukan namanya. Dehidros TNI AL pada tahun 1982, misalnya menyatakan ada 17.508, dan secara formal diperkuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Namun akibat adanya perubahan politik dan yuridis, Indonesia telah kehilangan empat pulau, yaitu Pulau Kambing/Atauro dan Pulau Yako di wilayah Timor Leste, dan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai akibat keputusan ICJ pada 17 Desember 2002, sehingga pulau Indonesia tinggal 17.504. Lihat Haris Djoko Nugroho, Kasubdis Perbatasan Laut dan Udara Ditwilhan, Kemhan, "Pengelolaan PPKT Sebagai Kawasan Strategis Nasional Ditinjau Dari Aspek Hankam", paparan disampaikan di FGD Pemberdayaan PPT Guna Memelihara Stabilitas Hankam, Lemhanas RI, Jakarta, 28 Juni 2013. Sementara Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Abidin menyatakan pada tahun 2017 jumlah pulau yang telah didaftarkan di PBB sebanyak 16.056 pulau. Lihat Kompas.com, "Indonesia Daftarkan 16.056 pulau ke PBB", di <http://regional.kompas.com/read/2017/08/21/19455111/indonesia-daftarkan-16056-pulau-ke-pbb>, diunduh 21 Agustus 2017.

### V

Papua Nugini. Sementara wilayah daratnya, Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Realitas ini menyebabkan perbatasan merupakan wilayah yang memiliki posisi penting dalam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia. Bila perbatasan dipahami secara sederhana sebagai garis imajiner yang memisahkan wilayah Indonesia dengan wilayah negara lain, maka dengan demikian wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama dari konfigurasi kedaulatan wilayah negara, sebagaimana yang dipahami dalam konsep negara modern dalam Perjanjian Westphalia (1648).

Sebagai manifestasi kedaulatan wilayah negara, wilayah perbatasan mempunyai multifungsi sangat strategis. Secara politik, wilayah perbatasan memberikan kepastian hukum untuk kedaulatan internal dan keluar, baik dalam rangka pengelolaan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional maupun dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Adanya kejelasan wilayah perbatasan ini juga akan memberikan kepastian hukum suatu negara untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayahnya demi kepentingan kemakmuran seluruh masyarakat. Perbatasan sebuah negara yang dikenal bersamaan dengan lahirnya negara, menurut Anthony D. Smith dalam bukunya *Ethnic Origin of Nations* (1986) yang pada awalnya merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnik tertentu, dalam perkembangan selanjutnya menggambarkan identitas nasional sebagai *a collective cultural phenomenon* yang merekatkan sebuah komunitas yang mendiami sebuah wilayah tertentu, seperti adanya kekhasan bahasa dan simbol-simbol.<sup>2</sup> Dengan demikian, wilayah perbatasan memiliki peran strategis dalam hubungannya dengan

---

2 Dikutip oleh Riwanto Tirtosudarmo, "Wilayah Perbatasan dan Tantangan Indonesia Abad 21: Sebuah Pengantar", Riwanto Tirtosudarmo dan John Habba (ed.), *Dari Entikong Sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Sewawak-Sabah)*, Jakarta: Sinar Harapan, 2005, hlm. 1.

## Kata Pengantar

keutuhan, kehormatan, martabat dan kedaulatan negara baik secara politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dengan merujuk pada posisi dan fungsi penting perbatasan di atas, hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia tidak lagi memiliki dasar alasan untuk tidak melakukan tata kelola perbatasannya secara baik yang salah satu elemen pentingnya dengan menetapkan kebijakan dan strategi yang tepat. Keamanan (*Security*) merupakan aspek vital dalam tata kelola perbatasan suatu negara, yang tujuan utamanya untuk menjaga keamanan demi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tegaknya kedaulatan negara. Apalagi realitas wilayah perbatasan sebagai garis terdepan pertahanan NKRI yang dengan posisi geografisnya secara langsung dan tidak langsung memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap segala bentuk dan jenis ancaman militer dan non militer.<sup>3</sup> Oleh karenanya, mengabaikan masalah keamanan di perbatasan berarti mengabaikan eksistensi, kelangsungan hidup bangsa dan keutuhan NKRI.

Meskipun keamanan menjadi aspek penting dalam tata kelola perbatasan, namun pembangunan di wilayah perbatasan juga tidak boleh diabaikan. Tata kelola perbatasan juga harus ditujukan untuk memakmurkan masyarakat, khususnya yang tinggal di perbatasan. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan ini sangat penting perannya karena secara langsung dan tidak langsung akan memperkuat aspek keamanan di perbatasan. Sebagai “halaman depan”, terciptanya kesejahteraan di perbatasan akan memberikan kontribusi positif terhadap kondisi pertahanan keamanan, baik regional maupun nasional. Terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di perbatasan tidak saja akan mampu meningkatkan rasa nasionalisme, melainkan juga dapat berperan sebagai “benteng” pertahanan

---

3 Disampaikan Kusnanto Anggoro dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK-LIPI, Jakarta, 31 Oktober 2013.

terhadap potensi infiltrasi pihak-pihak yang bermaksud memusuhi Indonesia.<sup>4</sup>

## II

Dalam konteks di atas, perbatasan RI-Malaysia merupakan salah satu wilayah perbatasan yang memiliki posisi penting dan strategis dalam konteks pembangunan nasional. Sebagai pintu gerbang NKRI, perbatasan kedua negara mencakup perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi, serta perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan sepanjang 2004 km. Ini merupakan perbatasan fisik terpanjang di Indonesia dengan negara lain, yang bentangannya melintasi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga provinsi terbatasan darat langsung dengan wilayah negara bagian Malaysia, yaitu Serawak dan Sabah.

Wilayah perbatasan RI-Malaysia yang dikenali saat ini pada hakekatnya merupakan produk kolonial. Dalam hal ini adalah perebutan wilayah antara bangsa Belanda dan Inggris di Kalimantan yang berujung pada kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam tiga Traktat, yaitu Traktat *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, tanggal 20 Juni 1891, *The Boundary Agreement* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, tanggal 28 September 1915, dan *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di Hague, tanggal 26 Maret 1928.

Sebagai sebuah produk kolonial, Indonesia dan Malaysia yang masing-masing mewarisi kesepakatan Belanda dan Inggris atas pembagian wilayah kedaulatan di perbatasan kedua negara hingga saat ini masih mewarisi persoalan atas pembagian wilayah yang juga belum

---

<sup>4</sup> Lihat hasil penelitian yang dilakukan Tim Perbatasan LIPI di Mita Noveria (ed.), *Kedaulatan Indonesia di perbatasan Perspektif Multidimensi*, Jakarta: Penerbit Obor, Maret 2017.



## Kata Pengantar

tuntas terselesaikan. Sejumlah persoalan terkait dengan penetapan batas wilayah laut dan darat antara RI-Malaysia mengindikasikan realitas tersebut. Salah satu sengketa perbatasan kedua negara adalah penentuan batas maritim kedua negara yang belum disepakati oleh kedua negara, terutama terletak di tiga segmen yaitu di segmen Selat Malaka, segmen Laut Cina Selatan, dan segmen Laut Sulawesi.<sup>5</sup> Sengketa di tiga segmen tersebut antara lain terkait dengan persoalan batas laut teritorial, Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen dan tumpang-tindih klaim wilayah perairan, terutama di sekitar Blok Ambalat. Tumpang-tindih ini sebagai akibat keputusan Mahkamah Internasional tentang Kepemilikan Pulau Sipidan-Ligitan kepada pemerintah Malaysia pada tahun 2002.<sup>6</sup> Sebagaimana halnya dalam wilayah perbatasan laut, Indonesia-Malaysia juga masih menghadapi sengketa dalam penetapan perbatasan darat. Ada sembilan titik batas yang hingga saat ini masih belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu lima titik di daerah Kalimantan Timur dan empat titik di daerah Kalimantan Barat.<sup>7</sup> Apabila hal tersebut tidak terkelola/ditangani dengan tepat berpotensi untuk menggerus kedaulatan negara yang pada gilirannya menyebabkan potensi kerugian di bidang sosial, ekonomi dan politik. Hilangnya dua pulau Sipidan dan Ligitan dengan keputusan *International Court of Justice* pada Desember 2002 ke Malaysia masih tersimpan kuat dalam ingatan masyarakat akan akibat minimnya kehadiran negara dalam memelihara wilayah perbatasannya. Minimnya kehadiran negara ini, sebagaimana dinyatakan dalam hasil simpulan penelitian Tim Perbatasan LIPI

---

5 Ganewati Wuryandari dan Firman Noor, "Negara dan Kedaulatan Politik: Sebuah Evaluasi Atas Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara dan Pemeliharaan Rasa Kebangsaan di Perbatasan RI-Malaysia, di Mita Noveria (Ed.), *Kedaulatan Indonesia di perbatasan Darat: Perspektif Multidimensi*, Laporan Penelitian Tim Perbatasan IPSK-LIPI, 2013.

6 KASAL, "Isu Ketahanan dan Keamanan Dalam Pengelolaan Daerah Perbatasan", DPD RI, Juni 2013.

7 Direktorat -23, BIN, Bahan Rapat Perbatasan Pada Rapat Kerja dengan DPD, 11 Juni 2013, hlm.3.

(2017), berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan Republik Indonesia di perbatasan.<sup>8</sup>

Di samping aspek demarkasi dan deliniasi batas di atas, permasalahan mendasar lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan yaitu permasalahan yang terkait dengan aspek sosial ekonomi dan aspek politik keamanan. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan sosial ekonomi yang secara umum dihadapi di daerah-daerah perbatasan darat Indonesia-Malaysia menyebabkan hak-hak penduduk yang tinggal di perbatasan atas layanan sosial dan ekonomi tidak dapat dipenuhi secara utuh, yang pada gilirannya berakibat pada kualitas sumber daya manusia yang juga lebih rendah

Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan sosial ekonomi sebagaimana yang dikemukakan di atas selanjutnya menimbulkan dampak yang bersifat non fisik. Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan sosial ekonomi menyebabkan hak-hak penduduk yang tinggal di perbatasan atas layanan sosial dan ekonomi tidak dapat dipenuhi secara utuh, yang pada gilirannya berakibat pada kualitas hidup yang rendah. Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pendapatan penduduk dan tingkat kemiskinan kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dikemukakan sebagai contoh. Di lihat dari IPM, dalam kurun 2010-2014 nilai IPM lima kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu dan Sangau yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak di Malaysia, selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata nilai IPM daerah non perbatasan di Kalimantan Barat.

---

<sup>8</sup> Noveria (ed.), *Kedaulatan Indonesia di Wilayah .....*, 2017, hlm. 299.

## Kata Pengantar

**Tabel 1. Perkembangan Nilai IPM Kabupaten Perbatasan dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2014**

Daerah	2010	2011	2012	2013	2014
Sambas	59,8	60,5	61,5	62,4	63,2
Bengkayang	62,5	62,9	63,4	63,9	64,4
Sintang	59,9	60,8	61,6	62,6	63,1
Kapuas Hulu	59,8	60,8	61,8	62,6	62,9
Sanggau	60,5	60,9	61,3	61,7	62,0
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>61,9</b>	<b>62,3</b>	<b>63,4</b>	<b>64,3</b>	<b>64,8</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Hal sama juga tampak pada perkembangan pendapatan per kapita, di mana secara umum daerah perbatasan memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2014, pendapatan per kapita Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu masing-masing adalah Rp25.427.494, Rp23.899.451, 23.786.189 dan Rp26.536.851, sementara untuk Kalimantan Barat Rp28.000.000. Dari lima kabupaten perbatasan hanyalah Kabupaten Sanggau yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Rp29.412.272.<sup>9</sup> Hal ini mungkin dikarenakan Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah perbatasan yang cukup maju pembangunannya di Indonesia sebagai dampak dari keberadaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong yang resmi dibuka tahun 1991. Sementara empat kabupaten perbatasan lainnya memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Barat. Akibatnya, secara rata-rata tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Kalimantan Barat jauh lebih tinggi dibandingkan daerah nonperbatasan, yaitu pada tahun 2013 adalah 19,56 sementara

<sup>9</sup> Ganewati Wuryandari dan Bawono Kumoro (Ed.), *Pengelolaan Wilayah Dan Kawasan Perbatasan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara*, Position Paper, Jakarta: DPD RI, April 2016, hlm. 13

Provinsi Kalimantan Barat 8,74.<sup>10</sup> Sementara ketimpangan pendapatan antara Kalimantan Barat dengan negara tetangga Malaysia, khususnya negara bagian Sarawak juga terus melebar dari tahun 2000-2013. Pada tahun 2013 besaran pendapatan per kapita Sarawak sudah lebih dari delapan kali pendapatan per kapita Kalimantan Barat.<sup>11</sup>

Hubungan kekerabatan antarpenduduk di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berasal dari etnis yang sama juga tidak jarang menimbulkan sengketa terkait dengan masalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yang tinggi melintasi batas wilayah kedua negara seringkali menyulitkan dalam pengelolaan keamanan di perbatasan. Tidak saja adakalanya menimbulkan permasalahan dalam administrasi kepabeanan dan imigrasi, melainkan juga berkelindan dengan kegiatan ilegal seperti perdagangan dan penyelundupan. Ketergantungan masyarakat Indonesia akan barang-barang kebutuhan pokok dari Malaysia juga menjadi salah satu faktor pemicunya.

Berbagai persoalan sosial ekonomi dan politik keamanan yang masih membelit di perbatasan Indonesia-Malaysia di atas menggarisbawahi adanya persoalan dalam tata kelola perbatasan. Kesungguhan pemerintah Indonesia yang diperlihatkan sejak era reformasi melalui penataan wilayah terdempannya melalui serangkaian perubahan paradigma, regulasi, penataan otoritas kelembagaan dan kewenangan, serta anggaran, pada kenyataannya belum menghasilkan pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif. Kondisi ini yang masih menjadi faktor keberlanjutan persoalan sosial ekonomi dan politik keamanan di perbatasan Indonesia-Malaysia.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 15.

### III

Berdasarkan hasil studinya mengenai wilayah perbatasan dan pengaruh aktivitas negara terhadap masyarakat yang ada di sekitar perbatasan, O.J. Martinez (1994) sebagaimana dikutip oleh Riwanto Tirtosudarmo mengelompokkan wilayah perbatasan ke dalam empat tipe.<sup>12</sup> Pertama adalah *Alienated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, biasanya akibat adanya perang, sengketa politik, kuatnya nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, dan persaingan etnik. Kedua adalah *Coexistent borderland*, suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan (*manageable level*) meskipun masih terdapat masalah-masalah yang belum terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan persoalan kepemilikan sumber-sumber daya strategis yang terdapat di daerah perbatasan. Ketiga adalah *Interdependent borderland*, suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua negara bagian daerah perbatasan, juga kedua negara, terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara. Keempat adalah *Integrated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara, dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.<sup>13</sup>

Berdasarkan tipologi wilayah perbatasan di atas, Riwanto Tirtosudarmo memasukkan perbatasan Indonesia-Malaysia dalam tipologi kedua dan ketiga, yaitu *coexistent* dan juga pada saat yang sama *interdependent borderland*.<sup>14</sup> Tipologi wilayah perbatasan yang *coexistent* karena Indonesia-Malaysia saat ini merupakan dua negara

---

12 Tirtosudarmo dan Habba (Ed.), *Dari Entikong Sampai .....*, hlm. 4.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

tetangga yang relatif berhasil dalam mengelola potensi konflik di perbatasan kedua negara. Salah satu indikasi kuatnya adalah penyelesaian saling klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui jalur damai diplomasi. Dua negara juga secara kelembagaan membentuk Sosek Malindo sebagai forum untuk membahas masalah-masalah di perbatasan.

Sementara dimasukkannya wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia ke dalam tipe *interdependent borderland*, karena sesungguhnya wilayah perbatasan kedua negara dalam kondisi saling membutuhkan. Ketergantungan akan sebagian barang-barang kebutuhan pokok dari Malaysia sudah merupakan bagian yang tidak terbantah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perbatasan Indonesia di Kalimantan. Namun sebaliknya, pada kenyataannya pihak Malaysia juga mempunyai kepentingan dan ketergantungan terhadap penduduk dan potensi alam di daerah perbatasan Indonesia, terutama dari hasil perkebunan, pertanian dan perikanan, serta pengiriman tenaga kerja. Oleh karenanya, menurut Rucianawati (2017) perbatasan wilayah kedua negara sesungguhnya memperlihatkan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan.<sup>15</sup>

Dalam kurun waktu hampir dua dekade terakhir sejak era reformasi, pengembangan wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah. Tidak saja terkait dengan posisi strategisnya sebagai garis terdepan, melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan dinamis internasional yang didorong oleh adanya perdagangan bebas dan globalisasi. Interdependensi dan interpenetrasi yang menjadi karakter globalisasi telah melahirkan tantangan besar dalam pengelolaan perbatasan negara, termasuk juga di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pergerakan lintas batas barang, orang dan jasa yang semakin cepat dan pesat yang menghubungkan antarwilayah dan kebijakan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

---

15 Rucianawati, "Eksistensi Malaysia di Perbatasan: Elemen Pengganggu Kedaulatan Indonesia?", di Noveria (Ed.), *Kedaulatan Indonesia di.....*, hlm. 293

## *Kata Pengantar*

Pengelolaan yang bertumpu pada kapasitas internal negara yang menjadi kekuatan utama pengelolaan perbatasan pada masa lalu nampaknya perlu reformasi pengelolaan perbatasan yang lebih bertumpu pada sebuah jaringan yang di dalamnya melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk juga para pemangku kepentingan dari pihak negara tetangga.

Urgensi pengelolaan perbatasan di atas nampaknya perlu dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kedua negara memiliki modal sosial untuk pengembangan bersama wilayah perbatasan mereka melalui karakter hubungan saling ketergantungan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Wilayah perbatasan Indonesia juga memiliki modal sosial berupa konektivitas dalam artian geografi dan budaya. Potensi konektivitas dapat dimanfaatkan secara optimal dengan mengintegrasikan pembangunan kawasan perbatasan kedua negara. Namun pada kenyataannya, faktor-faktor tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan yang diharapkan untuk masyarakat yang tinggal di perbatasan Kalimantan. Kebaruan dalam pengelolaan perbatasan di masa reformasi, termasuk akselerasi pengembangan wilayah perbatasan antara lain melalui pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan infrastruktur dan regulasi Inpres Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, terbukti juga belum memberikan jawaban atas keterbelakangan pembangunan di perbatasan Kalimantan. Masih ada gap atau ketimpangan kondisi masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia.

Pertanyaan mengapa dan bagaimana agar kita mampu meningkatkan kesejahteraan bersama-sama secara optimal di perbatasan Malaysia-Indonesia menjadi fokus kajian buku ini.

Buku yang disusun oleh para peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI ini didasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017. Memang sudah banyak hasil kajian berupa buku, laporan penelitian dan tulisan ilmiah yang menulis mengenai pengelolaan perbatasan, namun masyarakat masih juga terus harus menantikan suatu karya ilmiah yang dapat memberikan gambaran komprehensif dan solutif atas kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan perbatasan. Sekarang dengan terwujudnya penerbitan buku ini harapan tersebut terpenuhi sehingga kita dapat lebih mengenal dan memahami permasalahan dalam pengelolaan perbatasan lewat suatu telaahan aspek keamanan, aspek kesejahteraan dan isu sosial politik dengan tawaran solusi melalui pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang integratif.

### **Daftar Pustaka**

- Anggoro, Kurnanto (Oktober 2013, 31). *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK-LIPI, Jakarta.
- Direktorat -23, BIN (11 Juni 2013). Bahan Rapat Perbatasan Pada Rapat Kerja dengan DPD.
- KASAL (Juni 2013). "Isu Ketahanan dan Keamanan Dalam Pengelolaan Daerah Perbatasan", disampaikan dalam Rapat Kerja dengan DPD RI.
- Kompas.com (Agustus 2017,21). "Indonesia Daftarkan 16.056 pulau ke PBB", di <http://regional.kompas.com/read/2017/08/21/19455111/indonesia-daftarkan-16056-pulau-ke-pbb>, diunduh 21 Agustus 2017.
- Noveria, Mita (ed.) (Maret 2017). *Kedaulatan Indonesia di perbatasan Perspektif Multidimensi*, Jakarta: Penerbit Obor.
- Nugroho, Haris Djoko (Juni 2013, 28). "Pengelolaan PPKT Sebagai Kawasan Strategis Nasional Ditinjau Dari Aspek Hankam", paparan disampaikan



## *Kata Pengantar*

di FGD Pemberdayaan PPT Guna Memelihara Stabilitas Hankam, Lemhanas RI, Jakarta, 28 Juni 2013.

Rucianawati, “Eksistensi Malaysia di Perbatasan: Elemen Pengganggu Kedaulatan Indonesia?”, di Noveria (Ed.) (Maret 2017), *Kedaulatan Indonesia di perbatasan Perspektif Multidimensi*, Jakarta: Penerbit Obor.

Tirtosudarmo, Riwanto (2015). “Wilayah Perbatasan dan Tantangan Indonesia Abad 21: Sebuah Pengantar”, di Riwanto Tirtosudarmo dan John Habba (ed.), *Dari Entikong Sampai Nunukan: Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Sewawak-Sabah)*, Jakarta: Sinar Harapan.

Wuryandari, Ganewati dan Firman Noor (2013). “Negara dan Kedaulatan Politik: Sebuah Evaluasi Atas Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara dan Pemeliharaan Rasa Kebangsaan di Perbatasan RI-Malaysia, di Mita Noveria (Ed.), *Kedaulatan Indonesia di perbatasan Darat: Perspektif Multidimensi*, Laporan Penelitian Tim Perbatasan IPSK-LIPI.

----- dan Bawono Kumoro (Ed.) (April 2016). “Pengelolaan Wilayah Dan Kawasan Perbatasan Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara”, *Position Paper*, Jakarta: DPD RI.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xix
Prolog	1
<b>Bagian I</b>	
<b>PENGELOLAAN KEAMANAN PERBATASAN DARAT INDONESIA- MALAYSIA PADA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN UTARA</b>	
<i>Lisbet</i>	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Urgensi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia	9
C. Pengelolaan Perbatasan	12
BAB II PENGELOLAAN KEAMANAN PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA PADA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN UTARA	15
A. Perkembangan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Malaysia Terkait Perbatasan	15
B. Pos Lintas Batas Negara di Perbatasan Indonesia-Malaysia	22
C. Persoalan Keamanan di Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia	27

C.1. Persoalan Keamanan di Perbatasan	27
C.2. Upaya Mengatasi Persoalan Keamanan di Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia	30
BAB III PENUTUP	38
DAFTAR PUSTAKA	40

## **Bagian II**

### **ISU KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERBATASAN *OUTWARD LOOKING* PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO (STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN UTARA)**

<i>Adirini Pujayanti</i>	45
BAB I PENDAHULUAN	47
A. Latar Belakang	47
B. <i>Border Diplomacy</i> dan <i>Human Security</i> di Kawasan Perbatasan	52
1. <i>Border Diplomacy</i>	52
2. <i>Human Security</i>	57
BAB II KEBIJAKAN <i>OUTWARD LOOKING</i> KAWASAN PERBATASAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL POLITIK PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO	60
A. Implementasi <i>Outward Looking</i>	61
1. Kalimantan Barat	62
2. Kalimantan Utara	64
3. Kesejahteraan Pendukung Keamanan Perbatasan	69
B. Prospek Kebijakan <i>Outward Looking</i> Kawasan Perbatasan di Bidang Kesejahteraan Dan Sosial Politik	74
1. Respon Positif Malaysia	74
2. Upaya Melepaskan Ketergantungan dari Malaysia	77
3. Otonomi Khusus Perbatasan	79

BAB III PENUTUP	82
Kesimpulan	82
Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
<b>Bagian III</b>	
<b>INTEGRASI PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA- MALAYSIA DI KALIMANTAN</b>	
<i>Humphrey Wangke</i>	87
BAB I PENDAHULUAN	89
A. Latar Belakang	89
B. Pengertian tentang Integrasi dan Wilayah Perbatasan	94
1. Integrasi	94
2. Wilayah Perbatasan	97
C. Kompleksitas Perbatasan	99
BAB II URGENSI PERUBAHAN STATUS PERDAGANGAN LINTAS BATAS INFORMAL	101
1. Implementasi BTA Tahun 1970	101
2. Dominasi Perdagangan Informal	104
3. Pembangunan Infrastruktur dan Daya Saing masyarakat Lokal	110
BAB III INTEGRASI PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN: DARI PEMBATAS MENJADI PENGHUBUNG	117
1. Pengembangan Kerja Sama Wilayah Perbatasan	118
2. Dari Pembatas menjadi Penghubung	123
BAB IV Kesimpulan	128
DAFTAR PUSTAKA	130
Epilog	135
Indeks	139
Tentang Penulis	143



# INDEKS

## A

Aruk, 7, 14, 24, 48, 50, 63, 70, 74,  
112  
ASEAN Economic Community (AEC),  
4, 99, 109, 120

## B

Badan Nasional Pengelola  
Perbatasan (BNPP), 15, 80, 127,  
136  
barter, 71, 104  
Bea Cukai, 18, 27, 31, 36  
beranda, 7, 25, 47, 57, 128  
BIMP-EAGA, 4, 70, 75  
biunivocal, 100  
Border Trade Agreement (BTA), 3,  
101

## D

daerah tertinggal, 61, 69, 91  
daya saing, 4, 47, 110, 113, 114, 120,  
126, 136  
dekonstruksi, 96  
delimitasi, 12, 13, 91, 117  
diplomasi preventif, 122  
divergensi, 99

## E

Energi Terbarukan Koridor Serawak  
(SCORE), 114  
Entikong, 1, 9, 14, 21, 24, 28, 48, 62,  
70, 77, 91, 108, 112, 125  
entitas politik, 89

## G

garis demarkasi, 89  
garis politik, 89  
geo-ekonomi, 96

## I

ilegal, 1, 3, 18, 26, 56, 70, 102, 106  
Imigrasi, 22, 31, 38, 71  
integrasi, 52, 63, 79, 87, 94, 95, 96,  
99, 100, 111, 117, 121  
Indonesia, 2, 4, 7, 9, 10, 15, 18, 23,  
26, 32, 49, 55, 58, 60, 66, 76,  
101, 103, 111,  
113, 120, 125  
perbatasan, 2, 7, 10, 25, 30, 54, 57,  
61, 75, 91, 103, 113  
Indonesia Malaysia Singapura-  
Growth Triangle (IMS-GT), 127,  
137  
Indonesia Malaysia Thailand-Growth  
Triangle (IMT-GT), 127, 137  
infrastruktur, 2, 48, 57, 64, 69, 73,  
79, 98, 110, 113, 114

integrasi, 52, 63, 79, 87, 94, 95, 96,  
99, 100, 111, 117, 121  
*inward looking*, 47, 557, 63, 111, 124

## **J**

Joko Widodo, 2, 7, 15, 24, 37, 48, 49,  
57, 62, 69, 74, 112, 123, 128,  
135

## **K**

Kalimantan Barat, 1, 7, 8, 10, 14, 15,  
20, 29, 33, 48, 62, 63, 74, 77, 109  
Kalimantan Utara, 7, 14, 21, 33, 35,  
64, 72, 91  
Kartu Identitas Lintas Batas (KILB),  
108  
kawasan, 2  
ekonomi, 4  
perbatasan, 2, 7, 9, 11, 25, 30, 38,  
47, 51, 52, 57, 62, 67, 72, 74, 77,  
93, 99,  
122, 124  
perkebunan, 10  
keamanan, 1, 3, 5, 10, 15, 19, 21, 25,  
27, 38, 47, 57, 58, 69, 118, 126  
kemiskinan, 57, 61, 66, 79, 136  
kerja sama, 4, 11, 13, 16, 18, 30, 31,  
37, 54, 55, 70, 95, 98, 100, 104,  
120, 121, 123  
konflik, 52, 54, 118, 122  
konvergensi, 94, 96, 121

## **L**

legal, 23, 52, 90, 105  
lokasi prioritas, 48, 113

## **M**

Malaysia, 2, 8, 10, 18, 26, 31, 53, 56,  
60, 62, 66, 71, 74, 91, 101, 103  
109, 114, 119  
masyarakat lokal, 2, 3, 71, 100, 102,  
108, 110, 123, 126, 128, 137

## **N**

Nawacita, 7, 111, 113  
negosiasi, 91  
Nunukan, 7, 9, 19, 20, 34, 64, 67, 68,  
72, 77, 79, 115

## **O**

*Outward Looking*, 2, 45, 47, 50, 57,  
61, 63, 74, 77, 82, 111

## **P**

Pas Lintas Batas (PLB), 9, 22, 23, 24,  
38, 104, 108  
patok batas, 18, 21, 32, 53, 118  
patroli, 18, 20  
*peace building mechanism*, 122  
pemberdayaan, 31, 58, 98  
pengamanan, 9, 11, 18, 30, 38, 69  
pengelolaan, 7, 12, 15, 26, 38, 52, 53,  
55, 59, 62, 74, 93, 99, 112, 115,  
117, 118  
penyelundupan, 1, 10, 18, 26, 28, 29,  
38, 91, 113, 116  
perbatasan, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 16,  
25, 33, 35, 36, 47, 50, 52, 54, 57,  
60, 62, 64, 74,  
77, 82, 89, 90, 93, 97, 111, 118,  
120, 124, 127, 128  
integrasi, 95  
kawasan pedalaman, 61



## Indeks

- kehidupan sosial di, 78  
kerja sama lintas, 122  
kompleksitas, 99, 100  
masyarakat di, 58, 59, 71  
otonomi khusus, 79  
pemekaran, 80  
pengelolaan, 62, 74, 93, 110, 113,  
115, 117, 118, 126  
perdagangan di, 104  
wilayah, 3, 7, 16, 19, 30, 47, 50,  
54, 56, 59, 60, 65, 80, 89, 90, 93,  
95, 97  
98, 99, 102, 105, 108, 111, 113,  
117, 120, 121  
perdagangan informal, 104, 106, 107  
perdagangan formal, 106, 126  
Pos Lintas Batas Negara, 2, 7, 11, 15,  
18, 22, 24, 25, 27, 38, 48, 50, 63,  
112  
Program Gerbang Pembangunan  
Terpadu Perbatasan (Gerbang  
Dutas), 48  
*prosperity approach*, 111  
proyek teritorial, 96  
Pusat Kegiatan Strategis Nasional  
(PKSN), 124
- R**  
regulasi, 3, 65, 69, 70, 79, 104  
rekonstruksi, 95, 96
- S**  
Sebatik, 7, 9, 49, 114, 115  
*security approach*, 111  
Sijori, 4, 104  
strategis, 33, 52, 76, 89, 93, 96, 110,  
114  
Subnasional, 98  
Subregional, 127  
supranasional, 98
- T**  
Tawao, 103  
Tenaga kerja Indonesia (TKI), 10  
Tradisional
- V**  
vital, 33, 93
- W**  
Wilayah Konsentrasi Pembangunan,  
113



## TENTANG PENULIS

**Lisbet** adalah Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menyelesaikan studi S2 di Program Pasca Sarjana FISIP Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2008. Kepakarannya adalah Masalah-Masalah Hubungan Internasional.

Beberapa tulisannya antara lain Kepentingan Nasional Amerika Serikat di *Inter-Parliamentary Union* pada tahun 2011, Pentingnya Peran Pelabuhan Hub Internasional di Indonesia Pada Era Globalisasi pada tahun 2011, Bantuan Luar Negeri di Bidang Energi terbarukan pada tahun 2013 dan Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia pada tahun 2014. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: lisbet.sihombing@dpr.go.id

**Adirini Pujayanti, Dra, MSi** adalah Peneliti Madya bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menyelesaikan studi S1 di Fisip Universitas Nasional tahun 1999. dan menyelesaikan S2 di Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia tahun 2002.

Ikut menjadi anggota tim penulis buku, di antaranya yaitu *Pemanasan Global dan Perubahan Iklim*, Jakarta: Sekertariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika 2009; *Masalah Negara Kepulauan Di Era Globalisasi*, Jakarta: Sekertariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika

2011; *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2012; *Potensi dan Masalah Pulau Perbatasan – Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Raja Ampat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2012; *Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2012; *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya terhadap Indonesia*, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2013; *Indonesia dan Kemitraan Strategis dalam Hubungan Internasional*, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2013, *Millennium Development Goals Agenda Pembangunan Pasca-2015 dan Peran Parlemen*, Jakarta: Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, 2014. *Masalah-Masalah Di Kawasan Menjelang Realisasi Komunitas ASEAN 2015*, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2014, *Isu-Isu Internasional Kontemporer Dalam Diplomasi Parlemen*, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2015, *Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo*, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, 2015. Penulis dapat dihubungi melalui email: [apujayanti@yahoo.com](mailto:apujayanti@yahoo.com).

**Drs. Humphrey Wangke, M.Si.**, menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP-Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 Program Kajian Wilayah Amerika-Universitas Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di Program Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Menjadi peneliti pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1990 dengan bidang kepakaran Masalah-masalah Hubungan Internasional. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku, antara lain: “IPU dan Regionalisme Asia”, dalam *Inter-Parliamentary Union dan Agenda Global Abad 21*, Azza Grafika (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2011. “Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, dalam *Tenaga Kerja Indonesia, Antara Kesempatan Kerja, Kualitas, dan Perlindungan*, Azza Grafika (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2011.

### Tentang Penulis

“Diplomasi Indonesia dalam Merespon Kejahatan Transnasional”, dalam Humphrey Wangke (Penyunting), *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Pencegahannya*, Azza Grafika (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2011. *Mencari Solusi atas Perubahan Iklim*, Cetakan Kedua, Penerbit Azza Grafika (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2012. “Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama Indonesia-Uni Eropa” dalam *Indonesia dan Kemitraan Strategis dalam Hubungan Internasional*. Penerbit Azza Grafika (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013. “Sekuritisasi Polusi Lintas Batas di Kawasan Asia Tenggara” dalam *Masalah-Masalah di Kawasan Menjelang Realisasi Komunitas ASEAN 2015*, Penerbit Azza Grafika (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2014. “Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Menghadapi Isu Lingkungan Hidup”, dalam *Analisis Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Dari Regionalisme ke Multilateralisme*, Penerbit Azza Grafika (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2014. dan “Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo dalam Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur di Indonesia”, dalam *Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo*. Penerbit Azza Grafika (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2015. Penulis dapat dihubungi melalui email: [dhanny\\_2000@yahoo.com](mailto:dhanny_2000@yahoo.com).

